



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1894/DJU/TI1.1/IX/2024 Jakarta, 20 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Pemenuhan Kelengkapan Berkas Kasasi
Pidana Secara Elektronik

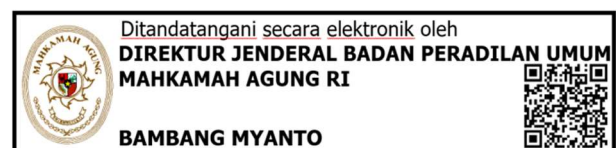
Yth. 1. Ketua Pengadilan Negeri
2. Panitera Pengadilan Negeri
(terlampir)

Menindaklanjuti Memorandum YM. Ketua Kamar Pidana Nomor 121/KM.PID/M.23/IX/2024 tanggal 19 September 2024 hal Pemberian peringatan kepada PT dan PN, dengan ini kami perintahkan kepada Saudara untuk **segera** memenuhi kelengkapan kekurangan berkas perkara kasasi elektronik yang permohonan kasasinya diajukan pada bulan Mei 2024 dan masa penahanan Terdakwa akan segera berakhir, daftar perkara yang harus segera dipenuhi dapat diakses pada link berikut : <https://s.id/KelengkapanKasasiPidana2024> paling lambat Rabu tanggal **25 September 2024**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengunggahan perbaikan dokumen **harus sesuai** dengan *field* tiap jenis dokumen pada bundel A dan B yang dimintakan oleh Mahkamah Agung.
2. Dalam hal pengisian data pengajuan upaya Hukum Kasasi dan PK secara elektronik melalui SIPP **harus benar-benar dilakukan dengan teliti dan melalui proses Pengendalian Mutu oleh Panitera** sebelum data pengajuan upaya hukum dikirim (dibuktikan dengan diunggahnya surat pernyataan kelengkapan berkas yang ditandatangani oleh Panitera).
3. **Tidak diperbolehkan melakukan edit data pihak dan sebagainya**, namun jika terjadi kekurangan data/kesalahan data maka Panitera wajib bersurat kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum untuk proses perbaikan datanya.
4. Data penahanan tingkat banding maupun tingkat pertama yang belum diisi oleh satker untuk segera dilengkapi.

Satuan Kerja yang telah menindaklanjuti agar mengirimkan laporan yang ditujukan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui link <https://s.id/LaporanPerbaikan2024> **tanpa mengirimkan surat manual.**

Demikian untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Yang Bersangkutan.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

DAFTAR NAMA SATUAN KERJA

No	Pengadilan Negeri
1	PENGADILAN NEGERI AMBON
2	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR
3	PENGADILAN NEGERI BENGKULU
4	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI
5	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA
6	PENGADILAN NEGERI CIKARANG
7	PENGADILAN NEGERI DEPOK
8	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
9	PENGADILAN NEGERI JANTHO
10	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN
11	PENGADILAN NEGERI KALIANDA
12	PENGADILAN NEGERI KENDAL
13	PENGADILAN NEGERI KENDARI
14	PENGADILAN NEGERI KEPANJEN
15	PENGADILAN NEGERI KETAPANG
16	PENGADILAN NEGERI KISARAN
17	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG
18	PENGADILAN NEGERI KUPANG
19	PENGADILAN NEGERI KUTACANE
20	PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
21	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG
22	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
23	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
24	PENGADILAN NEGERI MALILI
25	PENGADILAN NEGERI MAMUJU
26	PENGADILAN NEGERI MARABAHAN
27	PENGADILAN NEGERI MEDAN
28	PENGADILAN NEGERI MUARO
29	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO
30	PENGADILAN NEGERI NATUNA
31	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
32	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN
33	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
34	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE
35	PENGADILAN NEGERI PARE-PARE
36	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT
37	PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
38	PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN
39	PENGADILAN NEGERI PENAJAM
40	PENGADILAN NEGERI PINRANG
41	PENGADILAN NEGERI POLEWALI
42	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
43	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU
44	PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA
45	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT
46	PENGADILAN NEGERI SALATIGA
47	PENGADILAN NEGERI SAMPANG
48	PENGADILAN NEGERI SANGGAU
49	PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH
50	PENGADILAN NEGERI SELONG
51	PENGADILAN NEGERI SENGKANG

No	Pengadilan Negeri
52	PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA
53	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
54	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
55	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
56	PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
57	PENGADILAN NEGERI SINJAI
58	PENGADILAN NEGERI SOLOK
59	PENGADILAN NEGERI STABAT
60	PENGADILAN NEGERI SUMBER
61	PENGADILAN NEGERI SUMENEP
62	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
63	PENGADILAN NEGERI SURABAYA
64	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
65	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG
66	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG
67	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG
68	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
69	PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
70	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
71	PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI
72	PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG